

Ujian Akhir Sekolah Tahun 2004 Tata Negara

UAS-SMA-04-01

Rumusan negara bila ditinjau dari organisasi kekuasaan adalah ...

- A. kumpulan perintah yang tertuang dalam perundang-undangan
- B. organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur masyarakat itu
- C. proses menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu
- D. asosiasi yang menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat
- E. proses pelaksanaan keinginan manusia dalam masyarakat

UAS-SMA-04-02

Suatu alasan *tidak* adanya keseragaman, para ahli memberikan pengertian tentang negara karena ...

- A. negara dapat dipelajari oleh semua orang yang berkepentingan
- B. masalah negara telah dipelajari pada semua tingkat pendidikan
- C. negara dipelajari oleh para pejabat dalam pemerintahan
- D. tinjauan tentang negara dari berbagai aspek kehidupan
- E. semua ahli dari berbagai disiplin ilmu dapat mempelajari negara

UAS-SMA-04-03

Perbedaan ilmu negara dengan ilmu tata negara bila dilihat dari objek penelitiannya, ilmu negara lebih menitikberatkan pada ...

- A. negara beserta strukturnya secara pragmatif
- B. falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa
- C. negara umum dan bersifat teroris
- D. negara dalam arti sempit dan bersifat khusus
- E. negara beserta struktur organisasi dan bersifat praktis

UAS-SMA-04-04

Kasus bubarnya Uni Soviet tahun 1990 kemudian muncul negara Rusia dilihat dari asal mula berdirinya negara adalah ...

- A. terbentuknya negara baru secara fusi
- B. daerah yang belum ada penguasanya
- C. suatu daerah menyatakan kemerdekaannya
- D. lahirnya negara baru karena memisahkan diri
- E. lenyapnya suatu negara dan berdiri negara baru

UAS-SMA-04-05

Sifat hakikat negara yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal, sehingga ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dinyatakan seperti di bawah ini, kecuali ...

- A. monopoli
- B. mengatur
- C. menindas
- D. memaksa
- E. mengayomi

UAS-SMA-04-06

Suatu unsur yang membedakan bentuk negara dengan bentuk kenegaraan adalah ...

- A. jumlah penduduk
- B. kekayaan negara
- C. wilayah negara
- D. kedaulatannya
- E. rakyat negara

UAS-SMA-04-07

Pengakuan oleh negara lain terhadap suatu negara termasuk salah satu unsur ...

- A. mutlak
- B. deklaratif
- C. konstitusif
- D. inisiatif
- E. persuasif

UAS-SMA-04-08

Dua konsep kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah ...

- A. res nulus dan res communis
- B. maritim dan kontinental
- C. landas benua dan landas kontinen
- D. nusantara dan archipelago
- E. mare liberum dan respublica

UAS-SMA-04-09

Pemerintah sewenang-wenang, konstitusi diabaikan, parlemen tidak berfungsi, berlaku satu partai dan kepala negara tidak ada batas waktunya.

Ciri-ciri pemerintah tersebut terdapat pada ...

- A. republik parlementer
- B. monarkhi parlementer
- C. monarkhi konstitusional
- D. republik absolut
- E. republik konstitusional

UAS-SMA-04-10

Kekuatan politik di lembaga legislatif tidak dapat menjatuhkan pimpinan eksekutif. Keadaan ini menunjukkan sistem pemerintahan ...

- A. parlementer
- B. ekstra parlementer
- C. kekaisaran
- D. presidensial
- E. demokrasi liberal

UAS-SMA-04-11

Salah satu keunggulan sistem pemerintahan demokrasi dari sistem pemerintahan monarkhi adalah ...

- A. penguasa menjadi penentu pejabat publik
- B. keterlibatan semua rakyat dalam masalah negara
- C. segala masalah bangsa dapat terselesaikan
- D. kemakmuran rakyat secara merata dapat terjamin
- E. kehidupan negara bebas dari korupsi dan kolusi

UAS-SMA-04-12

Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan monarkhi dengan republik menurut Leon Duguit adalah ...

- A. cara penunjukan kepala negara
- B. jumlah orang yang memegang kekuasaan
- C. sifat kekuasaan yang dilaksanakan
- D. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan
- E. cara mencapai tujuan suatu negara

UAS-SMA-04-13

Menurut ajaran klasik, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan pribadi dan bertindak sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan disebut ...

- A. aristokrasi
- B. monarkhi
- C. oligarkhi
- D. tirani
- E. demokrasi

UAS-SMA-04-14

Faktor utama yang membedakan antara demokrasi klasik dengan demokrasi modern adalah ...

- A. tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara
- B. peran serta rakyat dalam kebijakan pemerintahan
- C. kesadaran politik masyarakat dalam pembangunan
- D. partisipasi rakyat dalam pemilihan umum
- E. tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

UAS-SMA-04-15

Salah satu penyebab lahirnya pernyataan hak asasi manusia sedunia di PBB adalah ...

- A. tuntutan merdeka negara-negara Asia Afrika
- B. kekalahan Jepang dan Jerman dalam perang Dunia II
- C. perang dunia yang melibatkan seluruh umat manusia
- D. kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II
- E. prakarsa dari Presiden Amerika Serikat dan PM Inggris

UAS-SMA-04-16

Perbedaan pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan terletak pada ...

- A. cara pemilihan wakil-wakil rakyat di parlemen
- B. penentuan tujuan dan ideologi negara yang dianut
- C. presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- D. kedaulatan ke luar dan ke dalam suatu negara
- E. hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara

UAS-SMA-04-17

Salah satu prinsip negara hukum adalah ...

- A. persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum
- B. perbedaan derajat dalam komunitas manusia
- C. adanya lembaga bantuan hukum bagi masyarakat
- D. terbentuknya lembaga peradilan secara hierarkis
- E. dibentuknya komisi hak asasi manusia oleh dunia internasional

UAS-SMA-04-18

Politik sebagai suatu pengetahuan adalah ...

- A. aktivitas manusia dalam partai politik
- B. penggunaan segala cara untuk kekuasaan
- C. pengetahuan tentang negara/pemerintahan
- D. usaha masyarakat untuk mendapat kekuasaan
- E. cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan

UAS-SMA-04-19

Di Indonesia dokumen kenegaraan yang isinya pertama kali banyak dipengaruhi oleh pernyataan sejagat hak asasi manusia di PBB adalah ...

- A. UUD 1945
- B. Konstitusi RIS 1949
- C. UUD Sementara 1950
- D. Piagam Jakarta
- E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

UAS-SMA-04-20

Ide dan pemikiran setiap individu dapat dihimpun dalam suatu kebijaksanaan yang dapat ditawarkan melalui pemilihan umum. Aktivitas tersebut terdapat dalam suatu negara demokrasi yang diperankan oleh ...

- A. partai politik
- B. organisasi masyarakat
- C. organisasi nonmasyarakat
- D. kelompok-kelompok penekan
- E. lembaga swadaya masyarakat

UAS-SMA-04-21

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ...

- A. Perkataan ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945
- B. Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup dalam Pembukaan UUD 1945
- C. Setiap sila Pancasila terdapat dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945
- D. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 ditetapkan oleh BPUPKI
- E. Hakikat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila

UAS-SMA-04-22

Kedudukan Pancasila menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 adalah ...

- A. sumber hukum dasar nasional
- B. sumber dari segala sumber hukum
- C. pandangan hidup bangsa
- D. perjanjian luhur bangsa Indonesia
- E. alat pemersatu bangsa Indonesia

UAS-SMA-04-23

Kondisi suatu negara yang sesuai dalam penerapan sistem multi partai adalah ...

- A. masyarakat yang memiliki budaya homogen
- B. keanekaragaman dalam komposisi masyarakat
- C. tingkat pendidikan masyarakat rata-rata tinggi
- D. terdapat hanya satu ideologi negara yang resmi
- E. masyarakat yang sedang melakukan proses pembangunan

UAS-SMA-04-24

Konflik di suatu daerah dapat diredam dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ...

- A. intervensi asing
- B. disintegrasi wilayah
- C. korupsi di daerah
- D. krisis kepemimpinan
- E. kerusakan lingkungan

UAS-SMA-04-25

Yang tidak menjadi wewenang pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah ...

- A. pendidikan
- B. pertanian
- C. perdagangan
- D. wisata dan budaya
- E. hubungan luar negeri

UAS-SMA-04-26

Seorang pejabat di daerah yang dilantik oleh pemerintah pusat dengan segala urusannya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas secara vertikal, sistem ini menggunakan asas ...

- A. sentralisasi
- B. desentralisasi
- C. otonomi daerah
- D. medebewind
- E. dekonsentrasi.

UAS-SMA-04-27

Perbedaan antara naik banding dan kasasi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah ...

- A. naik banding oleh pengadilan negeri sedangkan kasasi oleh pengadilan tinggi
- B. naik banding ke pengadilan tinggi sedangkan kasasi ke Mahkamah Agung
- C. perkara kasasi oleh MA sedangkan perkara naik banding oleh Mahkamah Konstitusi
- D. naik banding dalam perkara pidana sedangkan kasasi dalam perkara perdata
- E. naik banding dalam perkara kejahatan sedangkan kasasi dalam perkara politik

UAS-SMA-04-28

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 7 B ayat (1) amandemen ketiga UUD 1945 adalah ...

- A. memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR yang menyatakan presiden tidak memenuhi syarat lagi menjadi presiden
- B. memberikan nasihat hukum kepada presiden bahwa negara dalam keadaan darurat sehingga layak dikeluarkan dekrit
- C. memberikan keputusan hukum kepada presiden agar mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR
- D. memberikan rekomendasi kepada DPR agar mengeluarkan undang-undang yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- E. memeriksa kelayakan semua produk hukum yang dikeluarkan presiden sesuai atau tidak dengan UUD 1945

UAS-SMA-04-29

Ratna dan Aris telah menikah lebih dari 10 tahun tetapi belum memperoleh keturunan, mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam lapangan hukum ...

- A. pidana
- B. dagang
- C. perdata
- D. intergentil
- E. tata negara

UAS-SMA-04-30

Salah satu imbalan politik dari diberlakukannya Konstitusi RIS adalah ...

- A. diberikan kebebasan mendirikan partai
- B. berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia
- C. diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda
- D. diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB
- E. dilaksanakannya pemilihan umum pertama

UAS-SMA-04-31

Pada masa Orde Baru, presiden menurut UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan pada amandemen I UUD 1945 kekuasaan tersebut ...

- A. masih tetap dipegang oleh presiden
- B. dipegang sepenuhnya oleh partai-partai
- C. dikuasai oleh partai pemenang pemilu
- D. dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- E. dipegang atas kerja sama presiden dengan DPR

UAS-SMA-04-32

Berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari ...

- A. koalisi menjadi parlemen
- B. parlementer menjadi presidensial
- C. presidensial menjadi parlementer
- D. kabinet ministrial menjadi nasional
- E. presidential menjadi ekstra parlementer

UAS-SMA-04-33

Salah satu perubahan ketatanegaraan setelah reformasi adalah ...

- A. dibentuknya komisi nasional HAM
- B. supermasi hukum yang lebih menonjol
- C. perubahan sistem pemilu secara distrik
- D. program pembangunan ekonomi kerakyatan
- E. ketua MPR dipisahkan dari ketua DPR

UAS-SMA-04-34

Penyebab jatuh bangunnya kabinet selama berlakunya UUDS 1950 adalah ...

- A. sistem parlementer lebih menitik-beratkan kepada kepentingan golongan
- B. sistem multipartai yang menitik-beratkan kepada stabilitas nasional
- C. tekanan politik yang berlaku berlebihan dari pihak dalam dan luar negeri
- D. seluruh potensi negara diarahkan untuk menghadapi pergolakan politik
- E. kemerosotan ekonomi akibat kurangnya perencanaan pembangunan

UAS-SMA-04-35

Perubahan yang prinsip dari UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar menjadi UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik adalah ...

- A. dominasi ketua umum dalam partai
- B. pembentukan pengurus partai dari pusat
- C. penampilan partai menjadi sangat dominan
- D. pendidikan tinggi sebagai syarat pengurus partai
- E. Pancasila tidak dijadikan satu-satunya asas partai

UAS-SMA-04-36

Jika seseorang warga Indonesia mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara lain, maka konsekuensinya menurut UU No. 2 tahun 1958 warga negara tersebut ...

- A. dinyatakan keluar dari wilayah RI
- B. dapat dituntut di muka pengadilan
- C. dapat kehilangan kewarganegaraan RI
- D. harus membayar denda kepada negara RI
- E. dinyatakan sebagai pengkhianatan negara

UAS-SMA-04-37

Perbedaan pemilihan umum masa Orde Baru dengan masa Reformasi adalah ...

- A. pemilu Orde Baru pelaksanaannya didominasi pemerintah, sedangkan masa Reformasi oleh komisi independen
- B. pemilu Orde Baru hanya memilih sebagian anggota DPR sedangkan Reformasi seluruhnya
- C. pemilu Orde Baru banyak terjadi kecurangan sedangkan Reformasi bersih dari kecurangan
- D. biaya pemilu Orde Baru ditanggung APBN sedangkan Reformasi oleh partai-partai
- E. pemilu Orde Baru memilih MPR/DPR RI sedangkan Reformasi oleh seluruh lembaga tinggi negara

UAS-SMA-04-38

Salah satu contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah ...

- A. mengadakan pelatihan kader petugas diplomatik
- B. membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRC
- C. menarik kembali duta besar yang habis masa jabatannya
- D. mengirim seorang diplomat senior Indonesia ke PBB
- E. mengadakan uji kelayakan di DPR kepada calon diplomat

UAS-SMA-04-39

Perbedaan perwakilan konsuler dengan perwakilan diplomatik adalah ...

- A. perwakilan konsuler bidang ekonomi, diplomatik bidang sosial budaya
- B. perwakilan konsuler bidang nonpolitik, diplomatik bidang politik
- C. perwakilan konsuler berkedudukan di ibu kota negara, diplomatik berkedudukan di kota besar
- D. perwakilan konsuler diangkat oleh presiden, diplomatik diangkat oleh MPR
- E. perwakilan konsuler di negara-negara berkembang, diplomatik di negara-negara maju

UAS-SMA-04-40

Kaidah-kaidah yang pada umumnya telah menjalani suatu proses sejarah panjang sebagai pengakuan dari masyarakat internasional, merupakan sumber hukum internasional yang disebut ...

- A. traktat
- B. kebiasaan internasional
- C. karya-karya ahli hukum
- D. keputusan organisasi internasional
- E. keputusan pengadilan internasional

UAS-SMA-04-41

Permasalahan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi pada akhir abad kedua puluh adalah ...

- A. kurangnya pertumbuhan ekonomi
- B. sulitnya pembayaran utang luar negeri
- C. proteksi yang berlebihan dari negara maju
- D. stabilitas keamanan yang kurang terkendali
- E. pemerataan pembangunan dalam negaranya

UAS-SMA-04-42

Peranan DPR dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah adalah ...

- A. menentukan juru runding pemerintah dalam perjanjian internasional
- B. merekomendasikan pejabat negara yang terlibat dalam perundingan
- C. menandatangani hasil perjanjian internasional yang disepakati
- D. meratifikasi perjanjian internasional yang telah ditandatangani
- E. mengesahkan masalah yang perlu untuk diadakan perundingan

UAS-SMA-04-43

Konvensi Wina 1958 tentang hukum laut dapat diklasifikasikan ke dalam perjanjian internasional yang bersifat ...

- A. treaty contract
- B. credentials committee
- C. successive treaty
- D. law making treaty
- E. pacta sunt servanda

UAS-SMA-04-44

Peranan negara-negara yang memiliki hak veto dalam organisasi PBB adalah ...

- A. memberikan dukungan finansial terhadap stabilitas dunia
- B. memberikan jaminan terpeliharanya kepentingan anggota PBB
- C. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban dunia
- D. agar PBB mampu memelihara kepentingan negara maju
- E. berjanji penyeimbangan keputusan Majelis Umum PBB

UAS-SMA-04-45

Liga Arab adalah suatu organisasi regional yang bertujuan ...

- A. memperkuat teknologi persenjataan bagi setiap negara anggota Liga Arab
- B. menghancurkan musuh-musuh anggota melalui tekanan organisasi
- C. tidak mengakui dengan syarat apapun untuk berdirinya negara Israel
- D. siap sedia untuk menghadapi segala macam ancaman dari negara Israel
- E. melarang penggunaan kekerasan senjata dalam penyelesaian masalah anggota

Uraian**UAS-SMA-04-46**

Tuliskan 3 macam kelemahan bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi!

UAS-SMA-04-47

Jelaskan dua sistem pemilihan umum dan bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia!

UAS-SMA-04-48

Jelaskan pengertian pemerintah yang berdaulat ke dalam dan ke luar negeri!

UAS-SMA-04-49

Jelaskan tiga macam sistem kepartaian!

UAS-SMA-04-50

Jelaskan perubahan kekuasaan presiden setelah amandemen IUUD1945 di bidang legislatif!